



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHANDRA OKANTARA
2. Jabatan : ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
3. NHK : 140086

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 711.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/76 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 456.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 336.350.000

1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
5. MOTOR, HONDA CRF 250 RALLY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 62.850.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.355.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.294.519

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.133.999.519

III. HUTANG Rp. 169.962.857



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

964.036.662

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.